

**PERAN BANK INDONESIA (BI) DALAM MENGAWASI SISTEM
PEMBAYARAN DAN MELINDUNGI NASABAH TERHADAP
TINDAK KEJAHATAN *SKIMMING* (STUDI PADA
BANK INDONESIA PERWAKILAN LAMPUNG)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

Rossa Fadhilah Arista

NPM : 1651020253

Program Studi : Perbankan Syari'ah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

**PERAN BANK INDONESIA (BI) DALAM MENGAWASI SISTEM
PEMBAYARAN DAN MELINDUNGI NASABAH TERHADAP
TINDAK KEJAHATAN *SKIMMING* (STUDI PADA
BANK INDONESIA PERWAKILAN LAMPUNG)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**



Pembimbing II : M. Yusuf Bahtiar, M.E.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

ABSTRAK

Kemajuan teknologi komputer sangat memberikan dampak yang luar biasa kepada jasa perbankan secara elektronik. Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks. Namun, perkembangan tersebut tidak terlepas dari bayang-bayang tindak kejahatan yang berpotensi mengalami kegagalan sistem dan sekelompok orang yang dengan sengaja melakukan pengcopian data dari kartu ATM (*skimming*). *Skimming* ialah kejahatan lewat ATM yang memanfaatkan kelengahan nasabah karena dilakukan dengan cara mencuri PIN kartu ATM sebagai pintu masuk transaksi. Modus operandinya adalah mengkloning data dari *magnetic stripe* yang terdapat pada kartu ATM milik nasabah. Oleh karena itu, sangat diperlukannya perlindungan hukum dari lembaga pengawas perbankan. Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang Undang Bank Indonesia. Bank Indonesia mempunyai peranan penting dalam memberikan perlindungan bagi nasabah agar tidak mengalami kerugian akibat tindakan dari pelaku *skimming*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan Bank Indonesia dalam mengawasi sistem pembayaran dari tindak kejahatan *skimming* di provinsi Lampung dan bagaimana peranan Bank Indonesia dalam memberikan upaya perlindungan bagi nasabah dari tindak kejahatan *skimming* di provinsi Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan dengan model pendekatan studi kasus yaitu suatu pendekatan penelitian yang mencoba untuk mengeksplorasi kehidupan nyata melalui pengumpulan data yang detail serta mendalam dengan melibatkan beragam sumber informasi, baik berupa wawancara, observasi dokumen ataupun laporan dengan cara mendeskripsikan objek dari kasus penelitian.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa BI menjadi pengawas sistem pembayaran dalam hal memastikan infrastruktur tidak *vailated* atau tidak dijahati oleh pelaku kejahatan (*skimmer*). Bank Indonesia mewajibkan penyedia jasa layanan sistem pembayaran (Bank) untuk melakukan pengawasan dan harus mengecek secara berkala kondisi ATM seperti ATM *cashout*, rusak, serta mengecek apakah ada alat-alat mencurigakan yang terpasang di ATM. Bank Indonesia saat ini menetapkan *National Standard Indonesian Chip Card Specification* (NSICCS) sebagai Standar Nasional Teknologi Chip kartu ATM dan/atau kartu Debit ditujukan untuk untuk meningkatkan keamanan bertransaksi serta memitigasi risiko terjadinya *fraud* yang dilakukan secara bertahap sampai dengan 31 Desember 2021.

Kata Kunci : *Bank Indonesia, Sistem Pembayaran, Perlindungan Nasabah, Skimming*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 780887-703531

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rossa Fadhilah Arista**
NPM : **1651020253**
Jurusan : **Perbankan Syariah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Peran Bank Indonesia (BI) dalam Mengawasi Sistem Pembayaran dan Melindungi Nasabah terhadap Tindak Kejahatan Skimming (Studi pada Bank Indonesia Perwakilan Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 16 Juli 2020
Penulis,



Rossa Fadhilah Arista
NPM. 1651020253



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Leikol H. Endro Suramin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 780887-703531

PERSETUJUAN

Judul Skripsi

**PERAN BANK INDONESIA (BI) DALAM
MENGAWASI SISTEM PEMBAYARAN DAN
MELINDUNGI NASABAH TERHADAP TINDAK
KEJAHATAN SKIMMING (Studi pada Bank Indonesia
Perwakilan Lampung)**

Nama Mahasiswa

Rossa Fadhilah Arista

NPM

1651020253

Program Studi

Perbankan Syariah

Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Madnasir, S.E., M.Si.

NIP. 197504242002121001

M. Yusuf Bahtiar, M.E.

NIP. 198912082011001

Mengetahui,

Ketua Prodi Perbankan Syariah

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy

NIP. 198208082011012009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Letkol H. Endro Suratmin Sukaramo Bandar Lampung Telp. (0721) 780887-703531

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“PERAN BANK INDONESIA (BI) DALAM MENGAWASI SISTEM PEMBAYARAN DAN MELINDUNGI NASABAH TERHADAP TINDAK KEJAHATAN SKIMMING (Studi pada Bank Indonesia Perwakilan Lampung)”** disusun oleh Nama: **Rossa Fadhilah Arista, NPM : 1651020253**, Jurusan **Perbankan Syariah**, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: **Senin, 31 Agustus 2020**.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. H. Ahmad Isaeni, M.A

Sekretaris : Suhendar, S.E., M.S.Ak., Akt

Penguji I : Fatih Fuadi, M.Si

Penguji II : Madnasir, S.E., M.Si

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si

NIP.198008012003121001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”*¹

(Q.S Al-Baqarah (2): 153)



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: D.B. Mirchandani, 2004), h. 17.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai ungkapan cinta, sayang dan rasa hormat yang tak terhingga skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayah Aryanto dan Ibu Sumirta terimakasih sudah mengandungku, membesarkanku, dan mendidikku menjadi orang yang tangguh dalam menjalani kehidupan ini, tanpa kehadiran kalian aku sebagai seorang anak mungkin tidak ada artinya. Hanya do'a kalian lah yang menuntunku menjadi wanita kuat untuk menjadi seorang yang berguna untuk hidupku.
2. Terimakasih kepada adikku Nabil Fadhlurrahman yang telah memberikan dukungan selama masa perkuliahan sampai pada tahap ini.
4. Dan untuk almamaterku tercinta tempatku menimba ilmu UIN Raden intan Lampung semoga semakin maju, selalu jaya dan berkualitas.

RIWAYAT HIDUP

Alhamdulillah peneliti dianugerahkan nama yang baik dari kedua orang tua dengan nama Rossa Fadhilah Arista, dilahirkan di Jakarta, 16 Juli 2000. Peneliti adalah anak pertama dari pasangan Ayah Aryanto dan Ibu Sumirta. Riwayat Pendidikan yang telah diselesaikan adalah :

1. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) penulis ditempuh di SDN 152 OKU, Sumatera Selatan diselesaikan pada tahun 2010.
2. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ditempuh di SMP Luqmanul Hakim Batumarta 2, Sumatera Selatan dan diselesaikan pada tahun 2013
3. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAS Al-Azhar 3 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2016
4. Pada tahun 2016 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
5. Demikianlah riwayat hidup penulis yang dapat dibagikan dari aspek Pendidikan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, karena atas segala rahmat, petunjuk serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Bank Indonesia (BI) dalam Mengawasi Sistem Pembayaran dan Melindungi Nasabah Terhadap Tindak Kejahatan *Skimming* (Studi pada Bank Indonesia Perwakilan Lampung)”**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi S1 Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Erike Anggraini, M.E.Sy. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
3. Bapak Madnasir, S.E., M.S.I selaku pembimbing I dan Bapak M. Yusuf Bahtiar, M.E. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penulis hingga dapat terselsaikannya penyusunan skripsi ini.

4. Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Lampung, seluruh karyawan dan nasabah yang bersedia memberikan data-data yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Yustitia Asri Ertaningrum selaku Manajer Analis Fungsi Analisis SP dan PUR serta Keuangan Inklusif dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Lampung yang bersedia penulis wawancarai untuk melengkapi data-data yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan fakultas Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung telah memberikan ilmu yang berarti.
7. Bapak dan ibu karyawan perpustakaan pusat dan perpustakaan fakultas yang selalu senantiasa membantu dalam menyediakan literatur bagi penulis.
8. Orang tuaku, kakakku, ponakan-ponakanku dan semua keluarga yang selalu berdoa dengan tulus dan memberiku motivasi keberhasilanku. Terima kasih kepada keluargaku, terima kasih banyak atas pelajaran yang kalian berikan kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan Perbankan syariah angkatan 2016.
10. Untuk keluarga besar PS C angkatan 2016 terima kasih telah menjadi keluarga selama 3 tahun 10 bulan ini yang membentuk dan menyaksikan perjuangan penulis hingga di titik ini.

11. Untuk sahabatku dari SMA sampai dibangku kuliah Julia Fitriani terima kasih selalu mendukung, menyemangati, menjadi teman curhat, menemani menunggu bimbingan dan selalu penulis repotkan.
 12. Untuk sahabat-sahabatku Devita Risthejawati, Elvina Sapitri, Aprilia Lestari, Tria Mei Diana dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu mendukung, menyemangati dan selalu penulis repotkan di segala situasi.
 13. Tekhusus untuk Adi Muhammad Udha, terima kasih atas dukungan, semangat, doa, saran, bimbingan, masukan dan motivasi yang diberikan dalam setiap waktunya.
 13. Semua pihak yang mendukung dan tidak dapat di sebutkan satu persatu oleh penulis namun telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
- Akhir kata, jika penulis ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT. penulis mohon ampunan dan perlindungan. Semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 16 Juli 2020

Rossa Fadhilah Arista
NPM. 1651020253

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian.....	14
E. Rumusan Masalah	15
F. Tujuan Penelitian	15
G. Signifikansi Penelitian	15
H. Metode Penelitian.....	16

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Bank Indonesia

a. Pengertian Bank Indonesia.....	24
b. Tugas Pokok Bank Indonesia	24
c. Visi, Misi dan Nilai-nilai Strategis Bank Indonesia	28

2. Bank

a. Bank Konvensional	30
b. Bank Syariah.....	31

3. Sistem Pembayaran

4. ATM

a. Pengertian ATM.....	33
b. Fitur ATM.....	34
c. Cara Kerja ATM	35

5. Tindak kejahatan Perbankan

6. Tindak Kejahatan <i>Skimming</i>	
a. Pengertian <i>Skimming</i>	36
b. Teknik <i>Skimming</i>	38
c. Cara <i>Skimming</i>	38
7. Perlindungan Nasabah	
a. Pengertian Perlindungan Nasabah	40
b. Hak Konsumen	40
B. Tinjauan Pustaka	42

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek	
1. Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Lampung	46
2. Tugas Pokok dan <i>Output</i> Satuan Kerja	48
3. Visi dan Misi Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Lampung.....	49
B. Deskripsi Data Penelitian	50

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian	
1. Peranan Bank Indonesia dalam Mengawasi Sistem Pembayaran dari Tindak Kejahatan <i>Skimming</i> di Provinsi Lampung	59
2. Peranan Bank Indonesia dalam Memberikan Upaya Perlindungan bagi Nasabah dari Tindak Kejahatan <i>Skimming</i> di Provinsi Lampung.....	73
B. Pembahasan	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lampung Menjadi Kota Populasi Pengguna Internet Terbanyak Ke-5 di Sumatera	5
Gambar 2. 0,1% pengguna internet di Indonesia tahun 2018 memakai internet untuk transfer uang online	6
Gambar 3. Tiga Elemen Situasi Sosial	19
Gambar 4. Tugas Bank Indonesia pada Sistem Pembayaran.....	54
Gambar 5. Penanganan Pengaduan Konsumen oleh Bank Indonesia	80



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Berita Acara Seminar Proposal

Lampiran 2. Blangko Konsultasi Skripsi

Lampiran 3. SK Pembimbing

Lampiran 4. Surat Keterangan telah Melaksanakan Wawancara di Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Provinsi Lampung

Lampiran 5. Pedoman Wawancara di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
Lampung



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **“Peran Bank Indonesia (BI) dalam Mengawasi Sistem Pembayaran dan Melindungi Nasabah terhadap Tindak Kejahatan *Skimming* (Studi pada Bank Indonesia Perwakilan Lampung)”**. Sebelum menguraikan pembahasan pada penelitian ini, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat pada penelitian ini.

1. **Peran** adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹ Dalam hal ini Bank Indonesia berperan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta berhak menetapkan dan memberlakukan kebijakan sistem pembayaran.

2. **Bank Indonesia (BI)** adalah bank sentral Republik Indonesia serta lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang sesuai Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.²

¹Indah Nuraini, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Bogor: CV Duta Grafika, 2010), h. 744.

²“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank indonesia” (On-line), tersedia di <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Documents/506.pdf> diakses pada Senin, 04 Mei 2020), Pukul 09.39.

3. **Mengawasi** adalah memperhatikan tingkah laku seseorang, mengontrol.³

Mengontrol sistem pembayaran yang ada di perbankan dan memperhatikan hal-hal yang dapat menjadi pemicu permasalahan yang ada.

4. **Sistem Pembayaran** merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain.⁴

5. **Melindungi** menyelamatkan (memberi pertolongan dan sebagainya) supaya terhindar dari mara bahaya.⁵

6. **Nasabah** adalah orang yang menjadi pelanggan (menabung, dsb) di bank.⁶

7. **Tindak** adalah sesuatu yang dilakukan, perbuatan.⁷ Sesuatu yang sangat merugikan nasabah.

8. **Kejahatan** adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.⁸

9. **Skimming** adalah pemasangan suatu alat di kanal pembayaran ATM yang fungsinya untuk menduplikasi atau mengeopy data pribadi nasabah,

³ Indah Nuraini, h. 85.

⁴“Sistem Pembayaran” (On-line), tersedia di <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/Contents/Default.aspx> diakses pada Selasa, 14 Januari 2020), Pukul 17.50.

⁵“Melindungi” (On-line), tersedia di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/melindungi> (diakses pada Senin, 04 Mei 2020), Pukul 09.04.

⁶Indah Nuraini, h. 671.

⁷“Tindak” (On-line), tersedia di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tindak> (diakses pada Senin, 04 Mei 2020), Pukul 09.11.

⁸“Kejahatan” (On-line), tersedia di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kejahatan> (diakses pada Senin, 04 Mei 2020), Pukul 09.14.

lalu kemudian data pribadi tersebut disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.⁹

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Secara Objektif, penelitian ini didasarkan oleh penerapan *electronic transaction* (e-banking) berbasis ATM pada perbankan yang diikuti oleh maraknya tindak kejahatan yang terjadi pada perbankan saat ini. Agar tidak terjadinya kebocoran data nasabah, diperlukannya peran Bank Indonesia dan perbankan dalam mengawasi secara berkala sistem pembayaran dan memberikan upaya perlindungan kepada nasabah agar nasabah dapat merasa aman dalam bertransaksi menggunakan ATM.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran Bank Indonesia dalam mengawasi berbagai tindak kejahatan yang terjadi di perbankan salah satunya yaitu *skimming*, serta upaya perlindungan nasabah terhadap tindak kejahatan yang terjadi.

2. Alasan Subjektif

- a. Pokok pembahasan proposal ini sesuai dengan ilmu yang dipelajari penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah. Penelitian ini juga berkaitan dengan bank dan lembaga

⁹ Yulistia Asri Eka Ningrum, Wawancara dengan Manager Analis Fungsi Analisis SP dan PUR serta Keuangan Inklusif dan Perlindungan Konsumen, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bandar Lampung, 12 Februari 2020.

keuangan lainnya, khususnya peran Bank Indonesia dalam mengawasi sistem pembayaran di dalam perbankan dan melindungi nasabah.

- b. Penulis meyakini dapat menyelesaikan proposal ini karena literatur dan sumber-sumber yang dibutuhkan dalam penulisan proposal ini tersedia di perpustakaan, jurnal, artikel, dan website mengenai peran Bank Indonesia dalam mengawasi dan melindungi nasabah terhadap tindak kejahatan yang dapat terjadi pada saat proses pembayaran.

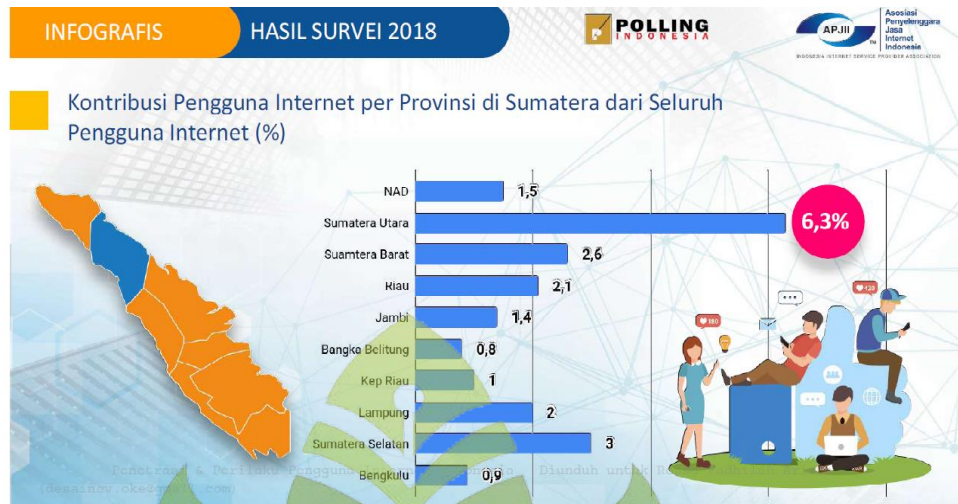
C. Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan perekonomian nasional yang sangat pesat telah memberikan berbagai manfaat dan menghasilkan berbagai variasi produk barang atau jasa. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi telekomunikasi, informatika pula sangat mendukung transaksi barang dan jasa antar suatu wilayah, bahkan antar negara. Kemajuan tersebut sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan seseorang akan barang dan jasa untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁰

Media yang digunakan dalam pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga berikut aturan mainnya. Kewenangan dalam mengatur dan menjaga

¹⁰Ali Murdiat, "Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Elektronik Banking dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.1, No.1, (1 April-Juni 2013), h. 57.

kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang Undang Bank Indonesia.¹¹



Sumber : <https://apjii.or.id/survei2018s>

Gambar 1. Lampung Menjadi Kota Populasi Pengguna Internet Terbanyak Ke-5 di Sumatera¹²

Dalam kehidupan sehari-hari kita sudah banyak menggunakan transaksi berupa teknologi yang berwujud *electronic transaction* (*e-banking*) melalui ATM, *phone banking*, *internet banking* dan lain sebagainya sebagai bentuk baru *delivery channel* (saluran pengiriman) memodernisasi setiap transaksi. Secara umum saat ini setidaknya terdapat tiga basis cara pembayaran, seperti: *papper-based* yaitu (*cek, bilyet giro dan nota debet*), *card-based* yaitu (kartu kredit, kartu debet dan kartu ATM), *Electronic-based* yaitu (*e-money, internet banking, mobile banking, electronic mall*).

¹¹“Sistem Pembayaran” (On-line), tersedia di <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/Contents/Default.aspx> diakses pada Senin, 10 Februari 2020), Pukul 15.12.

¹²“Survei 2018s” (On-line), tersedia di <https://apjii.or.id/survei2018s> diakses pada Sabtu, 09 Mei 2020), Pukul 10.28.



Sumber : <https://apjii.or.id/survei2018s>

Gambar 2. 0,1% pengguna internet di Indonesia tahun 2018 memakai internet untuk transfer uang online¹³

Pada saat ini media transaksi elektronik menjadi primadona bagi masyarakat maupun bisnis industri perbankan. Pada saat ini, hampir semua industri keuangan sudah mengandalkan kegiatan operasionalnya berdasarkan pada teknologi informasi yang berupa *e-banking*. Kebutuhan akan pelayanan *e-banking* akan semakin meningkat dikarenakan tuntutan kebutuhan pengguna dimasa depan yang semakin meningkat pula. Sistem *e-banking* memiliki

¹³“Survei 2018s” (On-line), tersedia di <https://apjii.or.id/survei2018s> diakses pada Sabtu, 09 Mei 2020), Pukul 10.35.

peran yang sangat penting dalam memudahkan bertransaksi elektronik tanpa harus datang ke bank secara langsung.¹⁴

Layanan perbankan meski menawarkan beragam kemudahan transaksi, sebenarnya masih belum sepenuhnya aman dari berbagai tindak kejahatan yang terjadi di dunia maya saat ini, disebabkan orang-orang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana banyak diberitakan, hingga saat ini masih saja terjadi kasus pembobolan atau pencurian lewat mesin ATM.

Kemajuan teknologi komputer sangat memberikan dampak yang luar biasa kepada jasa perbankan secara elektronik. Bank menyediakan layanan internet banking semata-mata untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan nasabah sebagai media untuk melakukan transaksi perbankan. Layanan *e-banking* memang sedang menjadi primadona dikarenakan memudahkan nasabah dalam melakukan hampir semua jenis transaksi perbankan tanpa ada batasan waktu dan tempat melalui sarana internet.

Pemanfaatan layanan *e-banking* bagi industri perbankan dalam memberikan layanan, tidak terlepas dari bayang-bayang tindak kejahatan yang berpotensi mengalami kegagalan sistem dan sekelompok orang yang dengan sengaja melakukan pengcopyan data dari kartu ATM (*skimming* ATM).¹⁵

¹⁴ Ali Murdiat, h.57.

¹⁵ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Bandung: CV. Andi Offset, 2010), h. 70.

Skimming ialah kejahatan lewat ATM yang memanfaatkan kelengahan nasabah karena dilakukan dengan cara mencuri PIN kartu ATM sebagai pintu masuk transaksi. Teknik ini dilakukan dengan cara menggunakan alat yang ditempelkan pada slot mesin ATM (tempat untuk memasukkan kartu ATM) dengan alat yang dikenal dengan nama *skimmer*. Modus operandinya adalah mengkloning data dari *magnetic stripe* yang terdapat pada kartu ATM milik nasabah.¹⁶

Oleh karena itu, bank juga harus memperhatikan dan mengendalikan risiko-risiko yang dapat terjadi dengan cara selalu memantau dengan prinsip kehati-hatian. Prinsip tersebut berlaku pula pada aktivitas *e-banking* dan prinsip tersebut harus disesuaikan dengan risiko-risiko spesifik yang melekat pada aktivitas tersebut.¹⁷

Adapun faktor yang menentukan perlindungan hukum bagi nasabah bahwa antara nasabah dengan lembaga keuangan perbankan sangatlah erat hubungannya, bank tidak akan mampu berdiri dan berkembang dengan baik apabila tidak mempunyai nasabah karena bank mempunyai peranan dalam memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, sebagai pelaku

¹⁶“Waspada 6 Cara Kuras Mesin ATM” (On-line), tersedia di <https://www.viva.co.id/digital/doktek/1055161-waspada-6-cara-kuras-mesin-atm-senyap-dan-makin-gila> (diakses pada Sabtu, 18 Januari 2020), Pukul 17.30.

¹⁷“Awat Penipuan Internet Banking” (On-line), tersedia di <https://www.literasipublik.com> (diakses pada Senin, 28 April 2019), Pukul 17.13

usaha perbankan sangatlah bergantung dengan nasabah untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.¹⁸

Perkembangan perbankan syariah menjadi fenomena yang menarik bagi praktisi maupun kalangan akademisi dalam kurun waktu 20 tahun belakangan ini. Bahkan, IMF juga menjadikan perbankan syariah sebagai alternatif sistem keuangan internasional.¹⁹

Perkembangan perbankan syariah saat ini tumbuh sangat pesat dan telah menawarkan banyak kemudahan bagi dunia perbankan syariah. Namun tidak menutup kemungkinan banyaknya resiko yang dapat terjadi, khususnya pada saat nasabah melakukan transaksi ATM.

Dalam kenyataan saat ini banyak terjadi pelaku usaha/pihak perbankan memiliki kecenderungan dengan mengenyampingkan hak-hak nasabah serta memanfaatkan kelemahan. Melindungi konsumen dalam Islam merupakan suatu keharusan dan merupakan syarat mutlak untuk tercapainya suatu keberhasilan.

¹⁸Husni Syazali dan Heni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 36.

¹⁹ Ibid, h.17

Perlindungan dalam Bahasa Arab sama artinya dengan “Asama” sedangkan konsumen dalam Bahasa Arab yaitu “mustahliku” Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ
وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾

“Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir” (Qs. Al-Maidah: 67).²⁰

Ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kepentingan konsumen tidak boleh diabaikan begitu saja, akan tetapi harus diperhatikan agar kepentingan konsumen dapat terlindungi dengan baik. Kemashlahatan yang dikehendaki adalah kemashlahatan untuk semua pihak baik penyedia jasa maupun konsumen.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: D.B. Mirchandani, 2004), h. 94.

Landasan Sunnah Rasulullah SAW menjadi pedoman dalam melindungi konsumen yang menyatakan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارُقُطْنِيُّ)

“Dari Abu Sa’id Sa’d bin Sinan al-Khudri ia berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah”. (HR. Ibnu Majjah dan al-Daruqutni).²¹

Hadits di atas bermaksud bakwa sesama pihak yang berserikat hendaknya saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak terjadinya kecurangan-kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebelah pihak yang melakukan perserikatan tersebut.

Perlunya sosialisasi aktif dari perbankan kepada masyarakat atau nasabah dan pegawai perbankan mengenai bentuk-bentuk kejahatan yang dapat terjadi dengan produk atau layanan yang disediakan. Saat ini sudah terdapat teknologi dan peraturan hukum yang dapat membuat internet banking menjadi aman, akan tetapi pihak perbankan dan pemerintah perlu terus mengupayakan agar penyelenggaraan *e-banking* lebih aman dan terjamin.²²

²¹Muhyiddin Yahya Bin Syaraf Nawawi, *Hadist Arba'in Nawawiyah*, terjemahan Abdullah Haidir (Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2010), h.94).

²²Husni Syazali Dan Heni Sri Imaniyati, h. 28.

Kewenangan dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang Undang Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia yang dituangkan dalam Undang Undang Bank Indonesia.

Dalam menjalankan mandat tersebut, BI mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yaitu keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen. Aman berarti segala risiko sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko *fraud* harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran.

Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelenggaraan sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala dalam ekonomi. Kemudian prinsip kesetaraan akses yang mengandung arti bahwa BI tidak menginginkan adanya praktek dalam hal monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk.²³

Terakhir adalah kewajiban bagi seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen. Sementara itu dalam kaitannya sebagai lembaga yang melakukan pengedaran

²³“Sistem Pembayaran” (On-line), tersedia di <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/Contents/Default.aspx> diakses pada Senin, 10 Februari 2020), Pukul 15.05

uang, kelancaran sistem pembayaran dengan terjaganya jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat dan dalam kondisi yang layak edar atau biasa disebut *clean money policy*.²⁴

Namun, dalam kenyataan saat ini banyak terjadi pelaku usaha/pihak perbankan memiliki kecenderungan dengan mengenyampingkan hak-hak konsumen serta memanfaatkan kelemahan konsumennya (nasabah) tanpa memikirkan bahkan mendapatkan sanksi hukum.²⁵

Disisi lain lemahnya posisi nasabah disebabkan perangkat hukum belum bisa memberikan rasa aman, serta peraturan perundang-undangan yang belum memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan dan hak-hak nasabah dan cara berpikir sebagai pelaku usaha semata-mata masih dalam konteks jangka pendek dan tidak memperhatikan kepentingan konsumen yang menjadi bagian dari berlangsungnya usaha dalam konteks jangka panjang. Padahal seharusnya baik bank konvensional maupun bank syariah dapat memberikan rasa aman dan melindungi nasabah dari berbagai hal yang dapat merugikan nasabah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis memandang bahwa kehadiran layanan *e-banking* sebagai media alternatif dalam memberikan kemudahan-kemudahan bagi nasabah suatu bank sepertinya menjadi solusi yang cukup efektif. Hal ini tidak terlepas dari kelebihan yang dimiliki internet itu sendiri,

²⁴*Ibid.*

²⁵Husni Syazali dan Heni Sri Imaniyati, h. 28.

dimana seseorang ketika ingin melakukan transaksi melalui layanan *e-banking* dapat melakukannya dimana dan kapan saja.

Namun, hal tersebut bisa menyebabkan kriminalitas bagi pengguna layanan *e-banking* tersebut. Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti tentang perlindungan yang diberikan kepada nasabah dalam melakukan kegiatan transaksi dalam sistem pembayaran yang berjudul:

“PERAN BANK INDONESIA (BI) DALAM MENGAWASI SISTEM PEMBAYARAN DAN MELINDUNGI NASABAH TERHADAP TINDAK KEJAHATAN *SKIMMING* (STUDI PADA BANK INDONESIA PERWAKILAN LAMPUNG)”.

D. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini menjadi lebih terarah dan dapat dipahami dengan jelas, peneliti bermaksud memfokuskan penelitian. Masalah pada penelitian ini difokuskan pada banyaknya kasus yang menimpa dan merugikan nasabah akibat dari tindak kejahatan *skimming* yang terjadi pada ATM dan peranan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mengawasi tindak kejahatan *skimming* yang dapat terjadi pada sistem pembayaran yang dapat merugikan nasabah serta upaya yang akan dilakukan Bank Indonesia dalam melindungi nasabah.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana peranan Bank Indonesia dalam mengawasi sistem pembayaran dari tindak kejahatan *skimming* di provinsi Lampung?
2. Bagaimana peranan Bank Indonesia dalam memberikan upaya perlindungan bagi nasabah dari tindak kejahatan *skimming* di provinsi Lampung?

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk memahami peranan Bank Indonesia dalam mengawasi sistem pembayaran dari tindak kejahatan *skimming* di provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui peranan Bank Indonesia dalam memberikan upaya perlindungan bagi nasabah dari tindak kejahatan *skimming* di provinsi Lampung.

G. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, yaitu memperluas wawasan mengenai peran Bank Indonesia dalam mengawasi

sistem pembayaran dan melindungi nasabah terhadap tindak kejahatan *skimming* dan dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik dalam penelitian ini.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih dalam lagi mengenai perbankan khususnya pada sistem pembayaran menggunakan kartu ATM.

b. Bagi Bank

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan masukan yang dapat membantu menyelesaikan masalah dalam bank syariah serta memperkuat strategi keamanan untuk transaksi yang lebih baik lagi.

c. Bagi Masyarakat Lampung Pengguna ATM

Dapat mengantisipasi dan meminimalisir resiko yang dapat terjadi dalam menggunakan transaksi melalui ATM.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah melakukan kegiatan dilapangan tertentu guna

memperoleh berbagai data dan memperoleh informasi yang diperlukan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data, peneliti menggali data-data yang bersumber dari lapangan.²⁶

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitiannya untuk menggambarkan dengan lebih teliti ciri-ciri usaha untuk menentukan frekuensi terjadinya sesuatu hubungan yang lain.²⁷

Penelitian ini menggambarkan tentang peranan Bank Indonesia dalam mengawasi sistem pembayaran dan melindungi nasabah dari tindak kejahatan *skimming* yang dapat terjadi di ATM.

2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini ialah Bank Perwakilan Lampung, yang beralamat di Jalan Hasanuddin No. 38, Kelurahan Gunung Mas, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung, Kode Pos 35225. Letak Bank Indonesia tersebut sangat strategi, Bank Indonesia berada di jalan kota yang mudah dijangkau oleh semua kalangan dari segala penjuru di Bandar Lampung.

²⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 66.

²⁷ *Ibid.*

3. Sumber data

Berdasarkan sumber perolehan data, maka data dalam penelitian skripsi ini diklasifikasikan menjadi:

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan oleh peneliti ialah berupa data verbal dari hasil wawancara dengan para informan yang kemudian peneliti olah dalam bentuk tulisan.²⁸ Dalam hal ini peneliti menggunakan data yang diperoleh dari Bank Indonesia yang kemudian disajikan dalam bentuk catatan lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh seseorang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.²⁹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa Jurnal, buku yang berkaitan dengan penelitian, Peraturan Bank Indonesia, Undang-undang dan karya-karya lain yang dipublikasikan serta sesuai dengan batasan masalah dalam penelitian ini.

4. Situasi Sosial

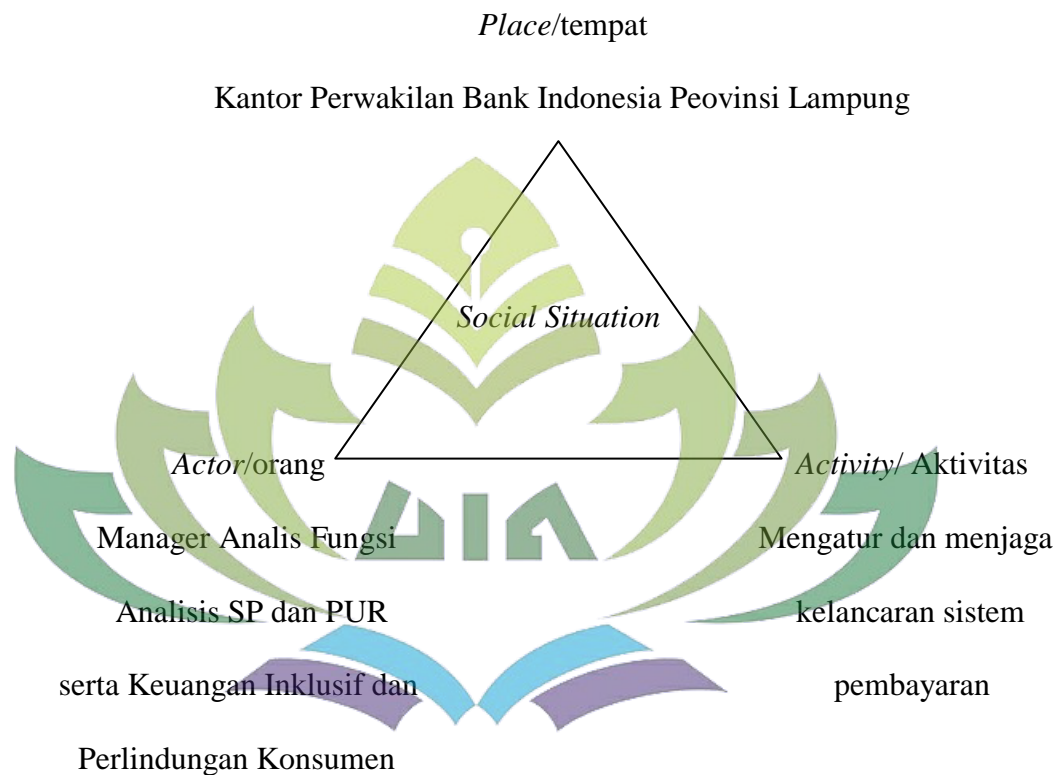
Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu.

Situasi sosial terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat/*place*, pelaku/*actors*,

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2014), h. 240

²⁹Abror, Thesis: "*Persepsi Pemustaka Tentang Kinerja Pustakawan pada Layanan Sirkulasi di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sragen*" (Semarang: Undip, 2013), h. 33.

dan aktivitas/*activity* yang berinteraksi secara sinergis. Artinya, pada penelitian kualitatif tidak dikenal istilah populasi tetapi situasi sosial dimana terdapat interaksi sinergis antara tempat, pelaku dan aktivitas. Berikut gambar sinergi ketiga elemen situasi sosial:³⁰



Sumber : Sugiyono (2010, h.216)
Gambar 3. Tiga Elemen Situasi Sosial³¹

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.215.

³¹ *Ibid*, h. 216

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif berupa data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun ketiga teknik pengumpulan data ini akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara mendalam (*in-depth interview*), yaitu suatu proses untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti harus mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.³² Wawancara akan dilakukan dengan bidang yang bersangkutan dengan permasalahan yang terjadi.

b. Observasi

Observasi ialah pengamatan atas perilaku manusia, atau lingkungan alam, budaya, keyakinan yang memiliki dampak kepada kehidupan manusia.³³ Peneliti dalam penelitian ini melaksanakan keduanya dalam rangka mendapatkan data seperti lokasi atau posisi dari bank, struktur organisasi.

c. Dokumentasi

Penggunaan dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang

³²Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 387

³³Sugiyono, h.203.

bersumber dari non-manusia atau benda mati yang sudah ada, sehingga peneliti tinggal memanfaatkannya untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi³⁴. Dalam hal ini peneliti menggunakan jurnal, buku yang berkaitan, penelitian terdahulu, serta karya-karya lain yang dipublikasikan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.³⁵

a. Analisis Sebelum di Lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum memasuki lapangan. Analisis dilakukan pada data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan terus berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.³⁶

Jadi peneliti terlebih dahulu mencari data-data dari buku, jurnal, tesis dan lainnya mengenai peran Bank Indonesia dalam melindungi nasabahnya dari kejahatan dunia maya, dalam hal ini yaitu pelaku *skimming*. Peneliti menduga bahwa masih maraknya pelaku kejahatan berupa *skimming* yang mengincar para nasabah. Oleh karena itu peneliti

³⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 194.

³⁵ Sugiyono, h. 402-403.

³⁶ *Ibid.*

dalam membuat skripsi penelitian, fokusnya adalah ingin mengetahui seberapa besar peran Bank Indonesia dalam mengawasi tindak kejahatan yang terjadi pada sistem pembayaran saat ini berupa *skimming*, serta bagaimana upaya Bank Indonesia dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

a. Analisis Selama di Lapangan

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti harus melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti dapat melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel.³⁷ Dalam hal ini Bank Indonesia kembali mengimbau masyarakat untuk terus menjaga kehati-hatian dalam penggunaan transaksi nontunai. Demi kemudahan masyarakat, fasilitas transaksi nontunai terus diperluas hingga mencakup berbagai aktivitas transaksi, termasuk untuk membantu kegiatan mudik masyarakat. Seiring hal tersebut, kewaspadaan terhadap kejahatan sistem pembayaran pun perlu semakin ditingkatkan. Peneliti menganalisis tentang upaya Bank Indonesia dalam menanggulangi tindak kejahatan yang disebabkan oleh pelaku *skimming*.

³⁷ *Ibid*, h.404

b. Analisis Data Selama di Lapangan

Proses penelitian kualitatif setelah memasuki lapangan, dimulai dengan menetapkan seseorang informan kunci “*key informant*” yang merupakan informan yang tepat dan sesuai dengan penelitian yang sedang kita teliti. Setelah itu peneliti dapat melakukan wawancara kepada informan tersebut, dan mencatat hasil wawancara. Setelah itu peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang sesuai pada obyek penelitian, dilanjutkan dengan menganalisis hasil wawancara yang telah dilakukan. Jadi proses penelitian dimulai dari sesuatu yang luas, kemudian memfokus dan meluas lagi.³⁸

Pada penelitian ini peneliti akan mewawancarai informan yang tepat, informan yang mengetahui persis tentang sistem pembayaran di dalam perbankan, sehingga akan mempermudah untuk mempertanyakan dan meneliti suatu masalah yang berkaitan dengan kejahatan *skimming* yang dilakukan oleh pelaku *skimming*.

³⁸ *Ibid*, h.414

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Bank Indonesia

a. Pengertian Bank Indonesia

Bank Indonesia merupakan bank sentral Republik Indonesia serta lembaga negara yang **independen**, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang sesuai Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.¹

b. Tugas Pokok Bank Indonesia

Sebagai bank sentral, BI mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara **kestabilan nilai rupiah**. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua dimensi, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa domestik (inflasi), serta kestabilan terhadap mata uang negara lain (kurs). Untuk mencapai tujuan tersebut BI mempunyai 3 tugas utama, yaitu:²

1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

¹“Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank indonesia” (On-line), tersedia di <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Documents/506.pdf> diakses pada Senin, 04 Mei 2020), Pukul 09.39.

²“Tentang BI” (On-line), tersedia di <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/tujuan/Contents/Pendukung.aspx> diakses pada Kamis, 13 Februari 2020), Pukul 19.21.

- 2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- 3) Serta mengatur dan mengawasi bank.

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter tersebut, BI berwenang menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan.

Pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran ditunjang oleh sektor manajemen intern yang secara terus menerus dikembangkan dan dibenahi. Tuntutan terhadap sektor ini menjadi semakin besar, mengingat tantangan yang dihadapi Bank Indonesia ke depan tidaklah ringan, terutama mengingat sangat kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh perekonomian nasional.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan seiring dengan perubahan tatanan sosial politik Indonesia, kebijakan sektor manajemen intern diarahkan terutama pada fungsi sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok Bank Indonesia melalui penyediaan jasa secara cepat dan tepat.³

Dalam hubungan ini, Bank Indonesia telah menempuh langkah-langkah kebijakan strategis di bidang manajemen intern yang pada dasarnya merupakan penajaman atas langkah-langkah yang selama ini dilakukan dan implementasi segera hal-hal yang telah diamanatkan dalam Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

³ *Ibid.*

Kebijakan di bidang manajemen intern pada intinya menyangkut pengembangan kelembagaan Bank Indonesia yang meliputi:

1) Pengembangan Organisasi

Berbagai langkah telah ditempuh Bank Indonesia untuk meningkatkan efektivitas organisasi yang independen. Dalam hubungan ini, rencana strategis pengembangan organisasi Bank Indonesia ke depan akan lebih difokuskan pada organisasi yang lebih ramping, dinamis dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan eksternal, serta mampu mendukung pengambilan kebijakan yang cepat, tepat dan akurat.

Berkaitan dengan upaya mewujudkan Bank Indonesia baru yang sesuai dengan semangat independensi seperti tertuang dalam UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, disadari perlu untuk merumuskan kembali suatu visi dan misi organisasi yang sesuai dengan semangat independensi tersebut. Untuk itu, Bank Indonesia telah merumuskan visi dan misi organisasi untuk ditetapkan sebagai strategi jangka panjang Bank Indonesia yang mengarah pada terwujudnya Bank Indonesia yang dipercaya (*trustworthy*) dan disegani (*respectable*).⁴

⁴ *Ibid.*

2) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Bank Indonesia terus mempersiapkan SDM yang kompeten yang tidak saja memiliki kemampuan keilmuan dan ketrampilan yang handal, tetapi juga integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Tentu saja hal tersebut disertai dengan penyempurnaan sistem manajemen SDM yang ada agar lebih mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Langkah-langkah peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bank Indonesia telah dirumuskan dengan menyusun strategi pengembangan sumber daya manusia yang ditempuh dengan menyempurnakan sistem penerimaan, promosi, mutasi, dan pendidikan serta pelatihan.

Di samping itu, Bank Indonesia juga telah mengembangkan nilai-nilai yang sesuai dengan pencapaian tugas visi dan misi Bank Indonesia, yaitu melalui pengembangan budaya kerja yang sesuai dengan tuntutan Undang-undang No. 23/1999 dan dapat diimplementasikan oleh seluruh pegawai serta dapat meningkatkan kontribusi pencapaian kinerja Bank Indonesia.⁵

Untuk itu, Bank Indonesia telah melakukan penyempurnaan sistem penerimaan dan promosi pegawai, menyelenggarakan program pendidikan kepemimpinan (*leadership*) secara intensif, terencana dan

⁵ *Ibid.*

berkesinambungan, serta program peningkatan tata tertib dan disiplin pegawai.⁶

3) Pengembangan Infrastruktur.

Langkah strategis lainnya yang terus dilakukan adalah penyempurnaan infrastruktur organisasi yang meliputi beberapa aspek antara lain penyempurnaan sistem dan mekanisme tata kerja, termasuk pendelegasian wewenang, pengambilan keputusan, peningkatan manajemen keuangan, pengembangan sistem teknologi informasi, pengembangan kehumasan, penajaman sistem pengawasan intern dan kebijakan hukum, serta pengelolaan dokumen.⁷

c. Visi, Misi dan Nilai-nilai Strategis Bank Indonesia

1) Visi

Menjadi bank sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia dan terbaik diantara negara *emerging markets*.⁸

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ “Tentang BI” (On-line), tersedia di <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/misi-visi/Contents/Default.aspx> diakses pada Kamis, 13 Februari 2020), Pukul 19.45.

2) Misi

- a) Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.
- b) Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.
- c) Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain.
- d) Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
- e) Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan.
- f) Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.
- g) Memperkuat peran internasional, organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi Bank Indonesia.⁹

⁹*Ibid.*

3) Nilai-Nilai Strategis Bank Indonesia

- a) Kejujuran Dan Integritas (*Trust And Integrity*)
- b) Profesionalisme (*Professionalism*)
- c) Keunggulan (*Excellence*)
- d) Mengutamakan Kepentingan Umum (*Public Interest*)
- e) Koordinasi Dan Kerja Sama Tim (*Coordination And Teamwork*)

Yang Berlandaskan Keluhuran Nilai-Nilai Agama (Religi).¹⁰

2. Bank

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat maupun menyalurkannya kepada masyarakat kembali dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah.¹¹

a. Bank Konvensional

Bank konvensional ialah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ “Perbankan Syariah dan Kelembagaannya” (On-line), tersedia
<https://www.ojk.go.id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx> (diakses
 pada Sabtu, 28 Maret 2020), Pukul 13.06.

lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.¹²

b. Bank Syariah

Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa MUI seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.¹³

3. Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain.

Media yang digunakan untuk pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagi lembaga berikut aturan mainnya. Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran

¹²Arief Budiono, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal Law and Justice* Vol.2 No.1, 2017.

¹³"*Tentang Syariah*" (On-line), tersedia di <https://www.ojk.go.id>(diakses pada Kamis, 15 Agustus 2019), Pukul 08.45.

sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam undang-undang Bank Indonesia.

Dalam menjalankan mandat tersebut, Bank Indonesia mengacu pada empat kebijakan sistem pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen:¹⁴

1. Aman, berarti segala resiko dalam sistem pembayaran seperti resiko likuiditas, resiko kredit, resiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran
2. Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelenggaraan sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi.
3. Kemudian prinsip kesetaraan akses yang mengandung arti bahwa Bank Indonesia tidak menginginkan adanya praktek monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk.
4. Terakhir adalah kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen.

Sementara itu dalam kaitannya sebagai lembaga yang melakukan pengedaran uang, kelancaran sistem pembayaran dijamin dengan terjaganya jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat dan dalam kondisi

¹⁴Evi Rosalina Widyayanti, "Analisis Pengaruh Kecenderungan Pergeseran Sistem Pembayaran Dari Tunai Ke Non-Tunai/Online Payment terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha". *Seminar Nasional Dan Call For Paper 2020*, (2020), h.194.

yang layak edar atau biasa disebut *clean money policy*. Secara garis besar pembayaran dibagi menjadi dua jenis yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai. Perbedaan mendasar dari kedua jenis sistem pembayaran tersebut terletak pada instrumen yang digunakan.¹⁵

4. ATM

a. Pengertian ATM

induk dari fasilitas ATM yaitu *Electronic Banking (E-Banking)*. *E-Banking* adalah sebuah layanan yang memungkinkan nasabah bank memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan bertransaksi dalam perbankan via elektronik diantaranya *phone banking*, *electronic fund transfer*, *internet banking* dan *mobile phone*. Melalui sistem ini, nasabah akan dimudahkan dalam mengakses rekening baik untuk transaksi pembayaran maupun mencari informasi tentang layanan produk dan jasa bank.

ATM (Anjungan Tunai Mandiri) biasa disebut *cash machine* adalah salah satu jenis layanan *Electronic Banking*. ATM secara khusus merupakan mesin dengan sistem komputer yang melayani nasabah bank untuk melakukan transaksi keuangan tanpa petugas manusia atau teller. ATM mengidentifikasi nasabah dengan kartu plastik yang berisi *magnetic stripe/ smart chip* dengan nomor tertentu dan beberapa informasi, seperti tanggal masa berlaku maupun verifikasi

¹⁵ *Ibid.*

kartu dll. Otentikasi pengguna kartu tersebut, bank mengaktifkannya dengan berkode atau PIN (*Personal Identification Number*).¹⁶

Sesuai dengan perkembangan teknologi, saat ini bank juga telah menyediakan 3 tipe mesin ATM lainnya, yaitu: mesin ATM yang hanya melayani transaksi non tunai, mesin ATM yang melayani transaksi penyetoran uang tunai *Cash Deposit Machine* atau CDM, dan mesin ATM yang dapat melayani semua transaksi yang telah disebutkan di atas. Selain di kantor bank, saat ini nasabah dapat dengan mudah menemukan mesin ATM di berbagai tempat, seperti restoran, pusat perbelanjaan, bandar udara, pasar, dan lokasi-lokasi strategis lainnya.¹⁷

b. Fitur ATM

Melalui ATM, nasabah bank dapat mengakses rekeningnya untuk melakukan berbagai transaksi keuangan, yaitu transaksi penarikan tunai dan transaksi non tunai, seperti pengecekan saldo, pembayaran tagihan kartu kredit, pembayaran tagihan listrik, pembelian pulsa, dan sebagainya.¹⁸

¹⁶Ana Fadhilah, “ATM CRIME: Pengaruh Reputasi Bank & Penanganan Masalah Terhadap Loyalitas Nasabah Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Moderating Pada Bank BRI Kediri Bagian Selatan-Jawa Timur Pasca Kasus Skimming ATM”. *At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah I*, Vol.1 No.1. (Maret 2019), h.3.

¹⁷Yulistia Asri Eka Ningrum, Wawancara dengan Manager Analis Fungsi Analisis SP dan PUR serta Keuangan Inklusif dan Perlindungan Konsumen, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bandar Lampung, 12 Februari 2020.

¹⁸Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Bijak Ber-eBanking*, (Jakarta, 2015), h. 7.

c. Cara Kerja ATM

Untuk menggunakan ATM, nasabah harus memiliki kartu ATM/debit/kredit dan PIN. PIN adalah kode (4-6 digit) angka yang dibuat oleh nasabah saat pertama kali menerima kartu ATM di bank. Kode tersebut harus dijaga kerahasiannya oleh nasabah supaya kartu ATM tidak dapat disalahgunakan oleh orang lain.

Nasabah memasukkan kartu pada slot kartu di mesin ATM dengan memperhatikan sisi kartu yang harus dimasukkan terlebih dahulu, kemudian nasabah akan diminta untuk memasukkan PIN. Setelah itu nasabah dapat melakukan transaksi dengan memilih menu yang tertera pada layar monitor ATM.¹⁹

5. Tindak Kejahatan Perbankan

Tindak kejahatan dalam perbankan biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan sistem perusahaan dan kelemahan manajemen. Bank Indonesia mengatakan setidaknya ada tiga modus kejahatan *cyber* yang menyerang sistem perbankan Indonesia, yaitu *skimming*, *phising* dan *malware*.²⁰

Skimming adalah tindakan mengambil data nasabah menggunakan alat perekam. Biasanya ini terjadi di mesin EDC dan juga di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). *Phising*, yang terkenal sejak 2004 yaitu

¹⁹*Ibid*, h. 8.

²⁰Meliana, "Fraud Perbankan Indonesia: Studi Eksplorasi". *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019*, (2019), h. 3.

modus para penjahat membuat web yang serupa dengan web transaksi perbankan dengan pengamanan hanya menggunakan *user id* dan password, hingga akhirnya penjahat dapat dengan mudah mengambil dana yang ada direkening nasabah. Sedangkan *Malware* adalah kode yang didapatkan pelaku melalui teknologi untuk melancarkan aksi kejahatan perbankan yang dilakukan.²¹

6. Tindak Kejahatan *Skimming*

a. Pengertian *Skimming*

Skimming adalah tindakan mencuri data nasabah dengan memasang alat perekam data, umumnya dilakukan pada mesin *Electronic Data Capture* (EDC) dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang fungsinya untuk menduplikasi atau menyalin data pribadi nasabah, lalu kemudian data pribadi tersebut disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.²²

Pada *skimming* proses pembobolan juga melibatkan proses memperoleh nomor pin nasabah agar pelaku *skimming* dapat mengakses mesin ATM menggunakan data nasabah untuk memperoleh pin nasabah dapat dilakukan dengan beberapa cara, yang paling sederhana adalah

²¹ *Ibid.*

²² Yulistia Asri Eka Ningrum, Wawancara dengan Manager Analis Fungsi Analisis SP dan PUR serta Keuangan Inklusif dan Perlindungan Konsumen, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bandar Lampung, 12 Februari 2020.

dengan mengintip melalui belakang bahu nasabah saat nasabah memasukkan pin.

Selain itu dapat dilakukan dengan memasang kamera untuk merekam gerakan jari nasabah saat memasukkan pin atau lebih canggih lagi dilakukan penggantian papan tombol pada mesin ATM oleh pelaku sehingga pin nasabah akan terekam secara otomatis saat nasabah menekan papan tombol. Setelah pelaku memperoleh data nasabah yang telah dimasukkan kedalam kartu palsu dan pin nasabah maka pelaku *skimming* dapat melakukan transaksi menggunakan kartu ATM baik penarikan tunai, transfer dana, maupun transaksi debit.²³

Perbuatan *skimming* dianggap selesai ketika pelaku secara nyata memiliki data elektronik, dan PIN dari korban dengan cara melakukan penyalinan data elektronik menggunakan alat *skimmer* dan memasang kamera pengintai di sekitar mesin ATM. Dalam hal ini sifat mengambil tidak dilihat dari hilangnya kekuasaan atas benda tersebut dari tangan korban, tetapi ada tidaknya penguasaan atas benda tersebut di tangan pelaku.

Tindakan aktif pelaku *skimming* untuk mengambil dan menguasai terlihat dari usahanya dengan memasang alat *skimmer* yang menjebak korban saat melakukan transaksi menggunakan mesin ATM untuk

²³Michael Enrick "Pembobolan ATM Menggunakan Teknik *Skimming* Kaitannya Dengan Pengajuan *Restitusi*". *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 2, (Maret 2019), h.561-562.

memperoleh data elektronik yang ada pada kartu ATM korban, dan memasang kamera pengintai secara tersembunyi untuk merekam PIN.²⁴

b. Teknik *Skimming*

Secara spesifik dalam “pembobolan bank” menggunakan teknik Skimming maka dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:

- 1) Mengintip saat nasabah memasukkan kombinasi pin di mesin ATM atau mesin debet.
- 2) Memasang kamera tersembunyi pada mesin ATM untuk merekam pergerakan tangan nasabah saat memasukkan kombinasi pin.
- 3) Memasang Papan tombol palsu yang berfungsi untuk merekam kombinasi pin yang dimasukkan oleh nasabah.

Selanjutnya setelah memperoleh data nasabah dan pin nasabah maka selanjutnya pada proses nomor 4 pelaku membuat kartu elektronik palsu yang ia buat sendiri dengan memasukkan data nasabah yang sebelumnya telah didapatkan.²⁵

c. Cara *Skimming*

Pada pembuatan kartu elektronik palsu ini dimungkinkan dilakukan dengan tiga cara yaitu:

- 1) Cara *altered card* yaitu dilakukan dengan menggunakan kartu elektronik asli yang diubah datanya. Cara ini dilakukan dengan

²⁴Destya Fidela Pratiwi “Pertanggung jawaban Tindak Pidana Skimming”. *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 4, (Juli 2019), h. 1217-1218.

²⁵Michael Enrick, h.566-567.

memanaskan relief pada kartu elektronik (*reembossed*) dan selanjutnya diisi dengan data pribadi nasabah (*re-encoded*).²⁶

2) Cara *totally counterfeit* yaitu pembuatan kartu elektronik yang seluruhnya palsu. Cara ini menuntut pelaku untuk mencetak kartu yang serupa dengan kartu elektronik asli dengan mencantumkan gambar, logo, dan nomor hingga seolah-olah kartu elektronik yang asli. Pembuatannya melibatkan proses *embossing* dan *encoding*.²⁷

3) Cara *white plastic Card* yaitu pembuatan kartu elektronik menggunakan kartu plastik putih polos. Cara ini hanya melibatkan proses *encoding* karena kartu palsu tersebut hanya dilakukan dengan melibatkan data tanpa melakukan pemalsuan pada fisik kartu.²⁸

Kartu elektronik palsu ini dapat dibaca dan digunakan pada mesin ATM maupun mesin debit layaknya kartu ATM. Pada akhir rangkaian proses tersebut maka pelaku *skimming* akan menggunakan kartu palsu yang ia buat menggunakan data nasabah untuk melakukan transaksi perbankan. Karena transaksi perbankan dilakukan pelaku dengan menggunakan jaringan komputer yang aksesnya menggunakan data nasabah, maka sistem secara otomatis akan mengenali transaksi tersebut sebagai transaksi atas nama nasabah.²⁹

²⁶*Ibid*, h.567.

²⁷*Ibid*.

²⁸*Ibid*.

²⁹*Ibid*, h. 568.

7. Perlindungan Nasabah

a. Pengertian Perlindungan Nasabah

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³⁰

b. Hak Konsumen

Menurut UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen Republik Indonesia pasal 4, hak konsumen antara lain yaitu:³¹

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa
- 2) Hak untuk memilih barang dan atau jasa dan juga memperoleh barang dan atau jasa itu dengan nilai tukar dan keadaan serta jaminan yang dijanjikan.

³⁰Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Khusus Penumpang Jasa Angkutan Traspormasi Darat”. *Jurnal Yustitiabelen*, Vol. 2 No. 1 (2016), h. 3.

³¹Sudaryatmo, *Hukum Dan Advokasi Konsumen*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999) h.85

- 3) Hak untuk mendapat perlakuan atau dilayani dengan benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 5) Dan lain sebagainya.

Kemudian kewajiban konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen Republik Indonesia Pasal 5, antara lain:³²

- 1) Membaca atau tunduk pada petunjuk informasi dan produsen penggunaan atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan
- 2) Beritikad baik dalam menjalankan transaksi pembelian barang atau jasa
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang menjadi kesepakatan
- 4) Ikut dalam usaha menyelesaikan hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

³² *Ibid*, h 86

B. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini peneliti merujuk pada penelitian serta jurnal- jurnal yang membahas topik yang sama sebagai sumber referensi maupun tinjauan pustaka pada penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut:

1. Skripsi Nor Hazrina, 2019, Universitas Andalas. Berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Nasabah Bank dari Tindak *Skimming* Ditinjau dari Undang- Undang Perlindungan Konsumen”. Peneliti menunjukkan bahwa Bank berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan, yakni ganti rugi sejumlah uang milik nasabah yang sebelumnya hilang akibat tidak *skimming* yang 2 terbukti tanpa adanya unsur kelalaian dari pihak nasabah. Adapun disamping pemberian ganti rugi pihak bank, sebagai cara untuk menjaga serta memulihkan kepercayaan masyarakat dikarenakan adanya pencurian dana nasabah melalui mesin ATM, pihak bank biasanya juga memberikan hadiah sebagai kompensasi, permohonan maaf atau kunjungan pihak Bank kepada nasabah yang mengalami kerugian atas hilangnya dana simpanan, semua tergantung kreativitas kantor cabang masing-masing. Namun secara SOP, apabila memang terjadi kehilangan dana yang diduga dilakukan pihak ketiga

melalui pembobolan mesin ATM, maka pihak Bank wajib memberikan ganti rugi..³³

2. Jurnal oleh Decky Hendransyah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syari'ah Bengkalis, 2012, dengan judul “Keamanan Layanan *Internet Banking* dalam Transaksi Perbankan”. Peneliti menyimpulkan bahwa setiap bank selalu memberikan layanan terbaiknya untuk nasabah mulai dari kemudahan, kenyamanan dan terutama keamanan dalam bertransaksi. Dari empat sistem *internet banking* yang telah dibandingkan dapat disimpulkan bahwa semuanya memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan. Terutama dari segi keamanan, terbukti pada keempat sistem *internet banking* yang telah dibandingkan semua menggunakan keamanan berlapis-lapis sehingga serangan atau kejahatan terhadap sistem *internet banking* mereka terjaga dengan aman³⁴.

3. Jurnal oleh Dian Ekawati yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau dari Perspektif Teknologi Informasi dan Perbankan”. Peneliti menyatakan bahwa Perlindungan terhadap nasabah korban kejahatan skimming dapat dilakukan dalam konteks penegakan hukum pidana dan penegakan hukum perdata sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 tahun

³³Nor Hazrina, Skripsi: “Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Nasabah Bank dari Tindak *Skimming* Ditinjau dari Undang- Undang Perlindungan Konsumen” (Padang: Universitas Andalas, 2019).

³⁴Decky Hendransyah, “Keamanan Layanan *Internet Banking* dalam Transaksi Perbankan”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol.1 No.1 (2012).

2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dikenal dengan Undang-undang ITE³⁵.

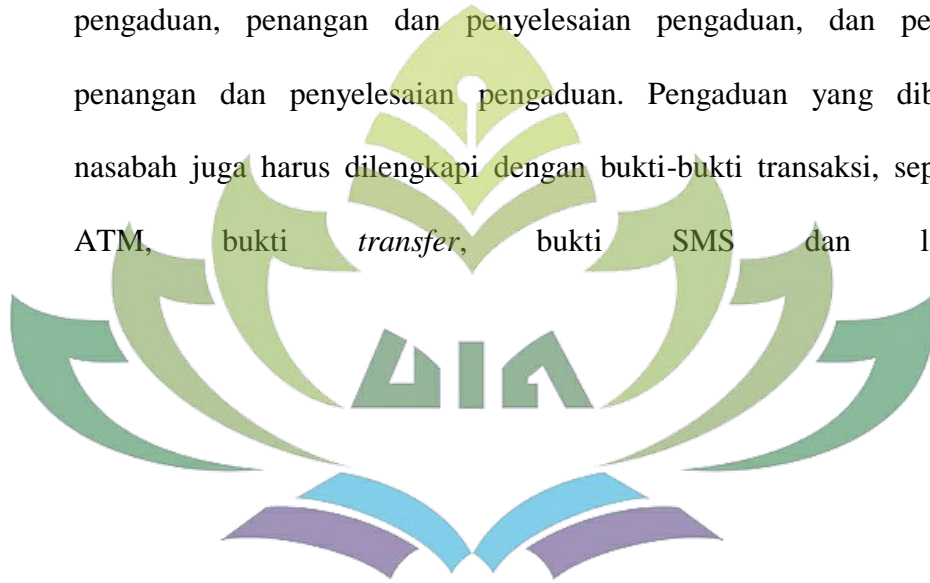
4. Jurnal oleh Dian Alan Setiawan yang berjudul “Perkembangan Modus Operandi Kejahatan *Skimming* Dalam Pembobolan Mesin Atm Bank Sebagai Bentuk Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*)”. Peneliti menyatakan bahwa Pencurian dana nasabah bank melalui penggandaan kartu ATM (*skimmer*) telah menjadi ancaman stabilitas dan rasa aman nasabah bank, sehingga pihak bank sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer. Faktor penyebab meningkatnya kejahatan dalam penggunaan sistem elektronik dengan modus operandi *skimming*, adalah faktor perbankan, faktor hukum dan faktor teknologi. penanggulangan terkait kejahatan *skimming* tersebut dapat dilakukan melalui sarana non penal yaitu upaya penanggulangan oleh pihak perbankan dan nasabah dan upaya penanggulangan oleh pihak pemerintah / penegak hukum.³⁶

5. Jurnal oleh Ali Murdiat yang berjudul “Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna *Elektronik Banking* dalam Sistem Hukum Ekonomi”. Peneliti menyatakan bahwa permasalahan yang dialami oleh nasabah dapat

³⁵Dian Ekawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan *Skimming* Ditinjau dari Perspektif Teknologi Informasi dan Perbankan”. *Unes Law Review*, Vol.1 No.2 (Desember 2018).

³⁶Dian Alan Setiawan, “Perkembangan Modus Operandi Kejahatan *Skimming* Dalam Pembobolan Mesin Atm Bank Sebagai Bentuk Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*)”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.16 No.2 (Oktober 2018).

diselesaikan dengan cara membuat pengaduan kepada pihak bank sesuai dengan ketentuan waktu penyelesaian yang sudah ditetapkan. Berdasarkan Pasal 02 PBI No.7/7PBI/2005 tentang penyelesaian pengaduan nasabah, disebutkan bahwa bank berkewajiban untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan untuk menyelesaikan pengaduan, bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan, dan pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan. Pengaduan yang dibuat oleh nasabah juga harus dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi, seperti struk ATM, bukti transfer, bukti SMS dan lain-lain.³⁷



³⁷Ali Murdiat. *Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Elektronik Banking Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Vol.1, No.1, (1 April-Juni 2013).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta: D.B. Mirchandani, 2004.
- Husni Syazali dan Heni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Indah Nuraini, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bogor: CV Duta Grafika, 2010.
- Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, Bandung: CV. Andi Offset, 2010.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Muhyiddin Yahya Bin Syaraf Nawawi, *Hadist Arba'in Nawawiyah*, terjemahan Abdullah Haidir, Maktab Dakwah dan Bimbingan Jliyat Rabwah, 2010.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Bijak Ber-eBanking*, Jakarta, 2015.
- Sudaryatmo, *Hukum Dan Advokasi Konsumen*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- , *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- , *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung:Alfabeta, 2018.

Jurnal

- Ali Murdiat, Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Elektronik Banking dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.1, No.1, 1 April-Juni 2013.
- Arief Budiono, Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Law and Justice* Vol.2 No.1, 2017.

Ana Fadhilah, ATM CRIME: Pengaruh Reputasi Bank & Penanganan Masalah Terhadap Loyalitas Nasabah Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Moderating Pada Bank BRI Kediri Bagian Selatan-Jawa Timur Pasca Kasus Skimming ATM. *At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah I*, Vol.1 No.1. Maret 2019.

Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Khusus Penumpang Jasa Angkutan Transporasi Darat. *Jurnal Yustitiabelen*, Vol. 2 No. 1 (2016).

Michael Enrick, Pembobolan ATM Menggunakan Teknik *Skimming* Kaitannya Dengan Pengajuan *Restitusi*. *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 2, Maret 2019.

Destya Fidel, Pratiwi Pertanggung jawaban Tindak Pidana *Skimming*. *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 4, Juli 2019.

Decky Hendransyah, Keamanan Layanan *Internet Banking* dalam Transaksi Perbankan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol.1 No.1 2012.

Dian Ekawati, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan *Skimming* Ditinjau dari Perspektif Teknologi Informasi dan Perbankan. *Unes Law Review*, Vol.1 No.2, Desember 2018.

Dian Alan Setiawan, Perkembangan Modus Operandi Kejahatan *Skimming* Dalam Pembobolan Mesin Atm Bank Sebagai Bentuk Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*). *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.16 No.2, Oktober 2018.

Thesis

Abror, Thesis: *Persepsi Pemustaka Tentang Kinerja Pustakawan pada Layanan Sirkulasi di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sragen*, Semarang: Undip, 2013.

Seminar

Evi Rosalina Widyayanti, Analisis Pengaruh Kecenderungan Pergeseran Sistem Pembayaran Dari Tunai Ke Non-Tunai/Online Payment terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha. *Seminar Nasional Dan Call For Paper 2020*.

Meliana, "Fraud Perbankan Indonesia: Studi Eksplorasi". *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019*.

Skripsi

Nor Hazrina, Skripsi: Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Nasabah Bank dari Tindak *Skimming* Ditinjau dari Undang- Undang Perlindungan Konsumen, Padang: Universitas Andalas, 2019.

Wawancara

Yulistia Asri Eka Ningrum, Wawancara dengan Manager Analis Fungsi Analisis SP dan PUR serta Keuangan Inklusif dan Perlindungan Konsumen, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bandar Lampung, 12 Februari 2020.

Sumber on-line

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia “*Survei 2018s*”. (On-line), tersedia di <https://apjii.or.id/survei2018s> (09 Mei 2020).

Otoritas Jasa Keuangan. “*Perbankan Syariah dan Kelembagaannya*”. (On-line), tersedia <https://www.ojk.go.id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx> (28 Maret 2020).

-----, “*Tentang Syariah*” (On-line), tersedia di <https://www.ojk.go.id> (15 Agustus 2019).

-----, “*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*”. (On-line), tersedia di: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undangundang/Documents/506.pdf> (04 Mei 2020).

Bank Indonesia. “*Bank Indonesia Menetapkan NSICCS sebagai Standar Nasional Teknologi Chip untuk Kartu ATM dan atau Kartu Debit*”. (On-line), tersedia di <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Bank-Indonesia-Menetapkan-NSICCS-sebagai-Standar-Nasional-Teknologi-Chipuntuk-Kartu-ATM-dan-atau-Kartu-Debit.aspx> (13 Juni 2020).

-----, “*Penanganan BP*”. (On-line), tersedia di <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/perlindungan-konsumen/penanganan-BI/mekanisme/Contents/Default.aspx> (13 Juni 2020).

-----, “*Peran BP*”. (On-line), tersedia di <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/peranbi/Contents/Default.aspx> (13 Juni 2020).

-----, “*Siaran Pers*”. (On-line), tersedia di https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_187316.aspx (13 Juni 2020).

-----, “Sistem Pembayaran”. (On-line), tersedia di <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/Contents/Default.aspx> (14 Januari 2020).

-----, “Tentang BI”. (On-line), tersedia di <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/tujuan/Contents/Pendukung.aspx> (13 Februari 2020).

-----, “Tentang BI”. (On-line), tersedia di <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/misi-visi/Contents/Default.aspx> (13 Februari 2020).

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan “Melindungi”. (On-line), tersedia di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/melindungi> (04 Mei 2020).

-----, “Tindak”. (On-line), tersedia di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tindak> (04 Mei 2020).

-----, “Kejahatan”. (On-line), tersedia di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kejahatan> (04 Mei 2020).

“Waspada 6 Cara Kuras Mesin ATM” (On-line), tersedia di <https://www.viva.co.id/digital/doktek/1055161-waspada-6-cara-kuras-mesin-atm-senyap-dan-makin-gila> (diakses pada Sabtu, 18 Januari 2020), Pukul 17.30.

“Awas Penipuan Internet Banking” (On-line), tersedia di <https://www.literasipublik.com> (diakses pada Senin, 28 April 2019), Pukul 17.13